RANCANGAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

"Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Oleh:
Yusliando
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

Samarinda, 17 April 2023

DASAR HUKUM YANG BERPENGARUH DALAM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2024

1. Amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah RKPD wajib disusun sebagai dokumen rencana pembangunan tahunan daerah

2. Sesuai Inmendagri No. 52 Tahun 2022, Kaltim diamanatkan menyusun **RPD Tahun 2024-2026** sebagai dokumen perencanaan transisi jangka menengah daerah, oleh karena itu Penyusunan RKPD Tahun 2024 **telah mengacu** pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026;

3. Substansi penyusunan RKPD mengacu pada **Kerangka Regulasi:** Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021;

4. **Dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS** sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

JADWAL PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2024

Target penetapan RKPD: minggu ke-4 Bulan Juni 2023

Proses Penyusunan RPD Kaltim 2024-2026

DES | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL

- Penyusunan ranwal RKPD
- Penyusunan ranwal Renja PD
- Konsultasi Publik RKPD
- Penyampaian SE Ka Daerah kepada Ka PD tentang penyusunan Renja PD
- Penyusunan Rancangan RKPD
- Penyampaian rancangan Renja PD ke Bappeda
- Forum Renja PD/Lintas PD
- Verifikasi kesesuaian Renja PD dengan ranwal RKPD
- **Penetapan RPD 2024-2026**
- Pelaksanaan Musrenbang
- Penyampaian Pokir DPRD (paling lambat seminggu sebelum musrenbang)
- **Penyusunan rancangan akhir RKPD** (paling lambat)
- Fasilitasi Ranperkada RKPD oleh Kemendagri
- **Penetapan RKPD Provinsi** (paling lambat)
- Penetapan RKPD Kab/Kota
- Penetapan RENJA PD

bappeda_kaltim Bappeda Kaltim bappeda.kaltimprov.go.id

KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%)

Tren LPE Kaltim sejak tahun 2018 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat

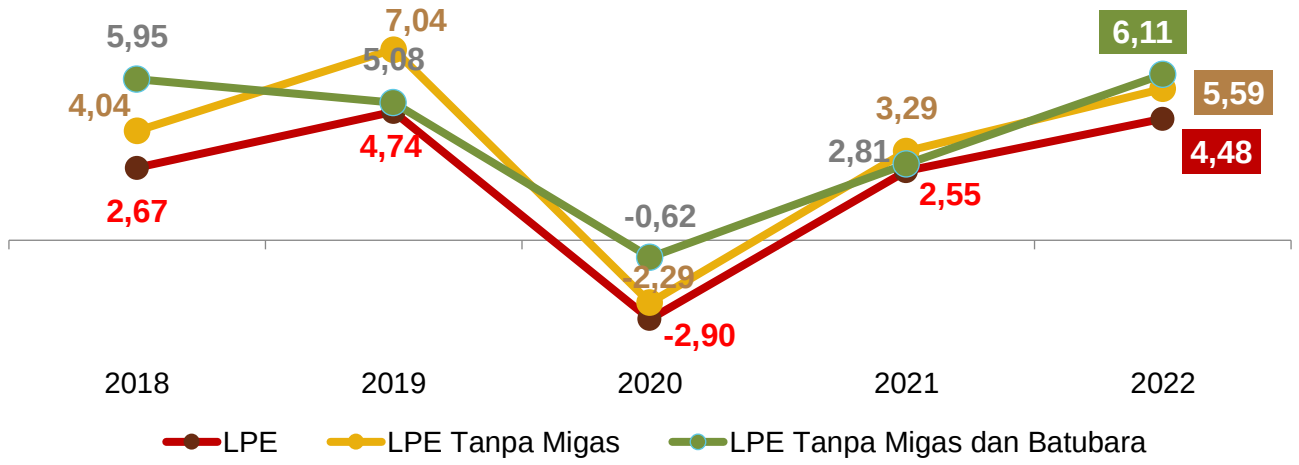

DISTRIBUSI PDRB REGIONAL PULAU KALIMANTAN TAHUN 2022 (%)

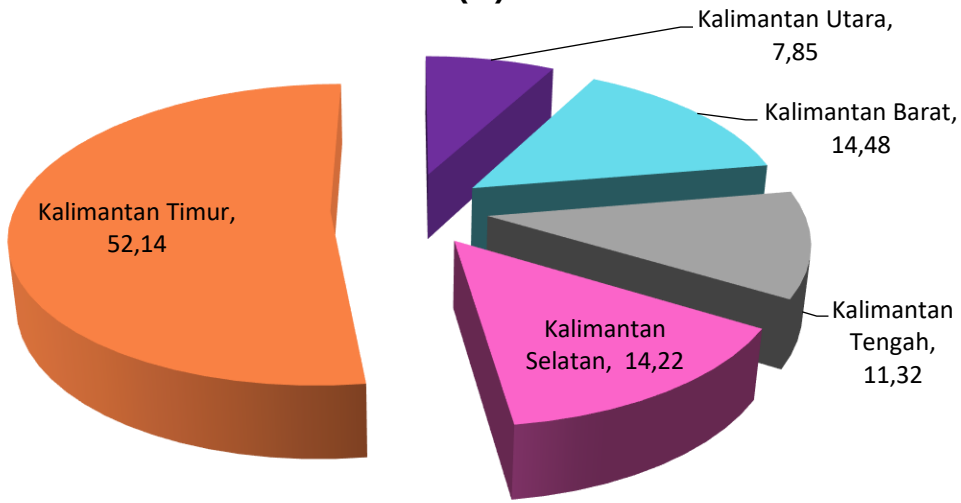

STRUKTUR PDRB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 (%)

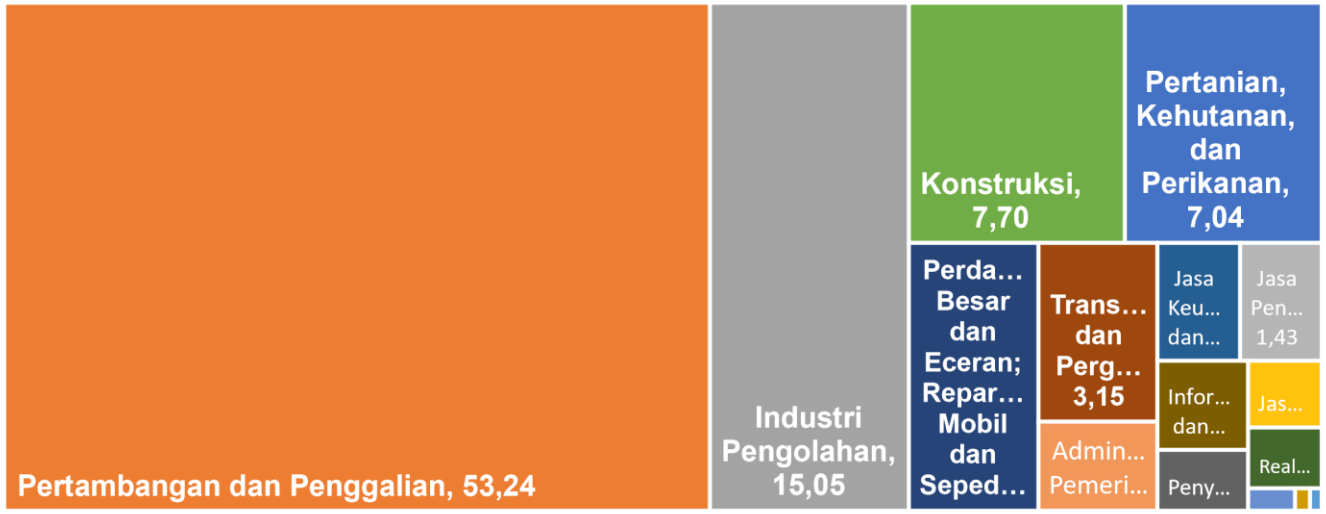

NILAI PDRB ADHB MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2022 (Miliar Rp)

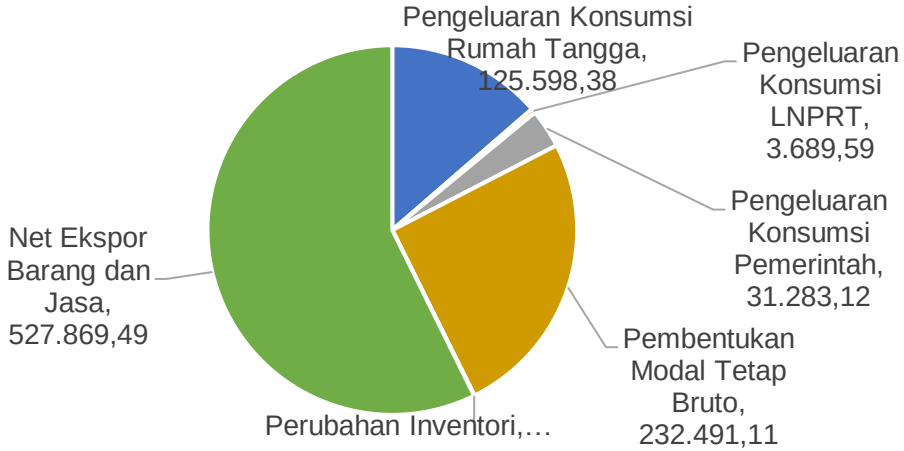

KINERJA PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2022

IPM Kaltim berada diatas Nasional. Terdapat 3 kab/kota dengan IPM terendah Kaltim, yaitu Mahulu, PPU, Kubar. Tren IPM Kaltim sejak tahun 2018 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat

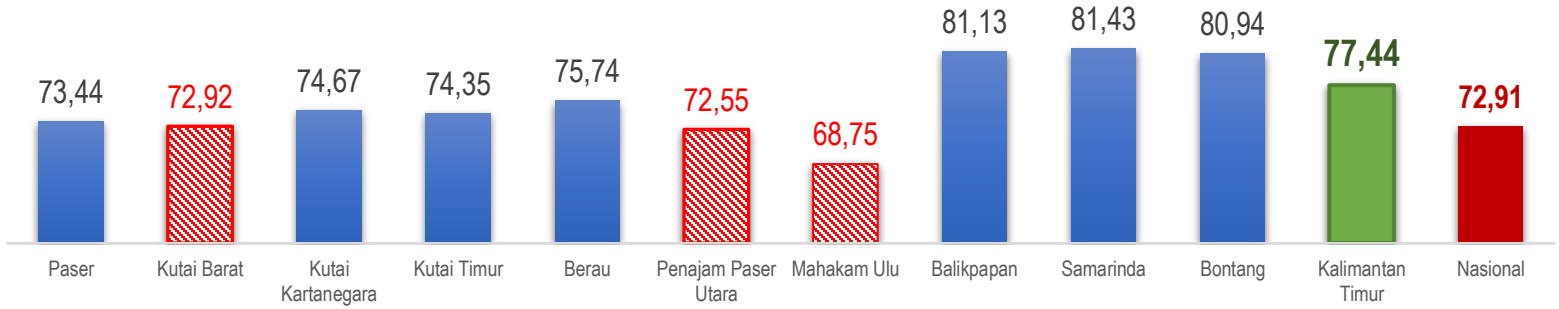

Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2022 (tahun)

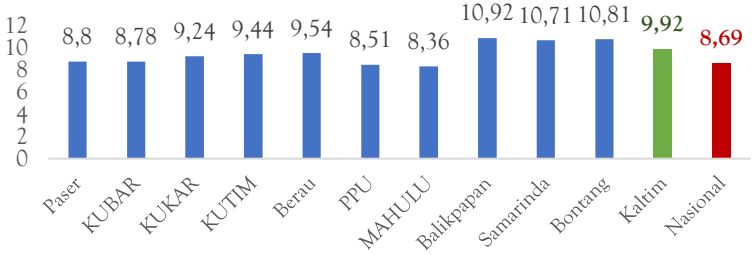

Usia Harapan Hidup Tahun 2022 (tahun)

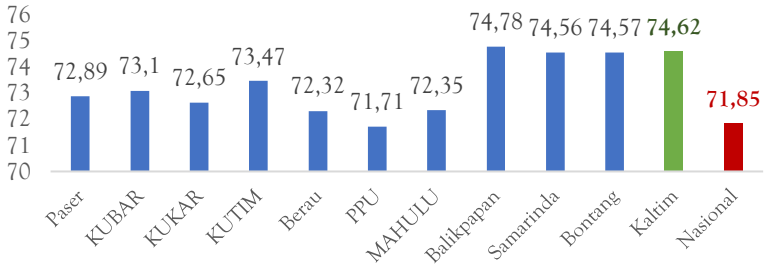

Harapan Lama Sekolah Tahun 2022 (tahun)

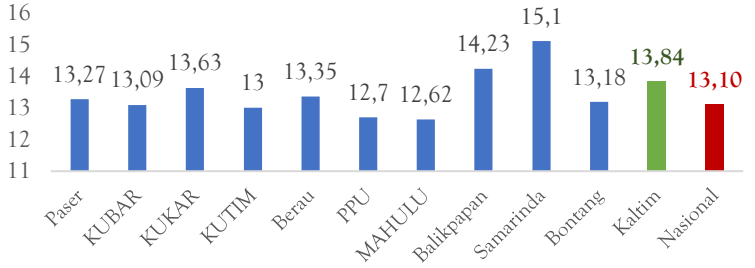

Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)

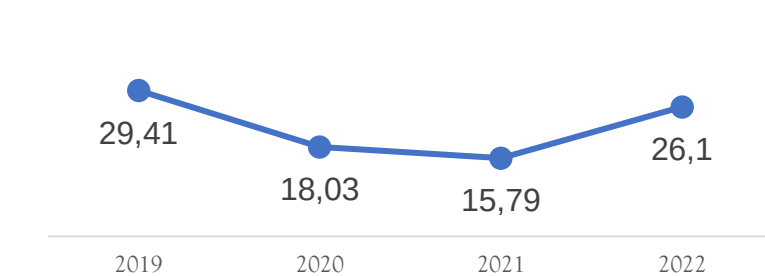

- Capaian kinerja dari IPM Kalimantan Timur telah melampaui target yang telah ditentukan, tetapi masih terdapat permasalahan karena belum tercapaianya kinerja harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta usia harapan hidup.
- Belum tercapainya rata-rata lama sekolah disebabkan oleh akses pendidikan wajib belajar 12 tahun belum terpenuhi secara merata.
- Harapan lama sekolah yang belum mencapai target disebabkan oleh pemerataan dan perluasan akses pendidikan baik pada peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan maupun pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikannya.
- Belum tercapaianya usia harapan hidup disebabkan oleh akses dan layanan terhadap fasilitas kesehatan masyarakat belum maksimal, khususnya pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

KONDISI KESEJAHTERAAN KALTIM (1)

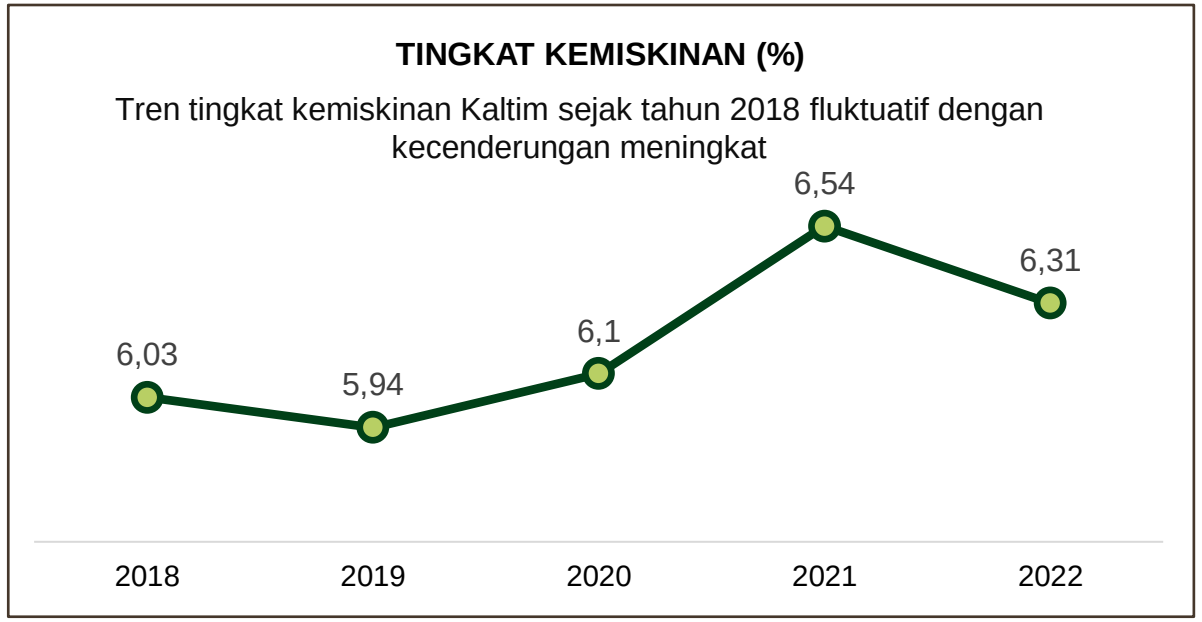

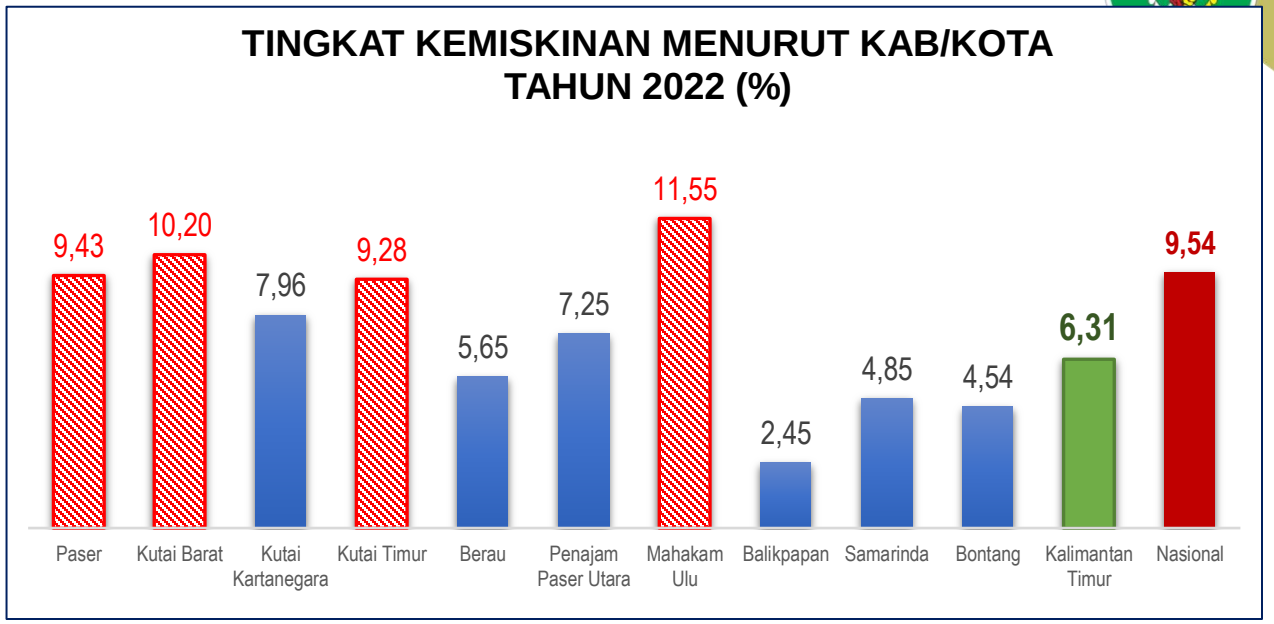

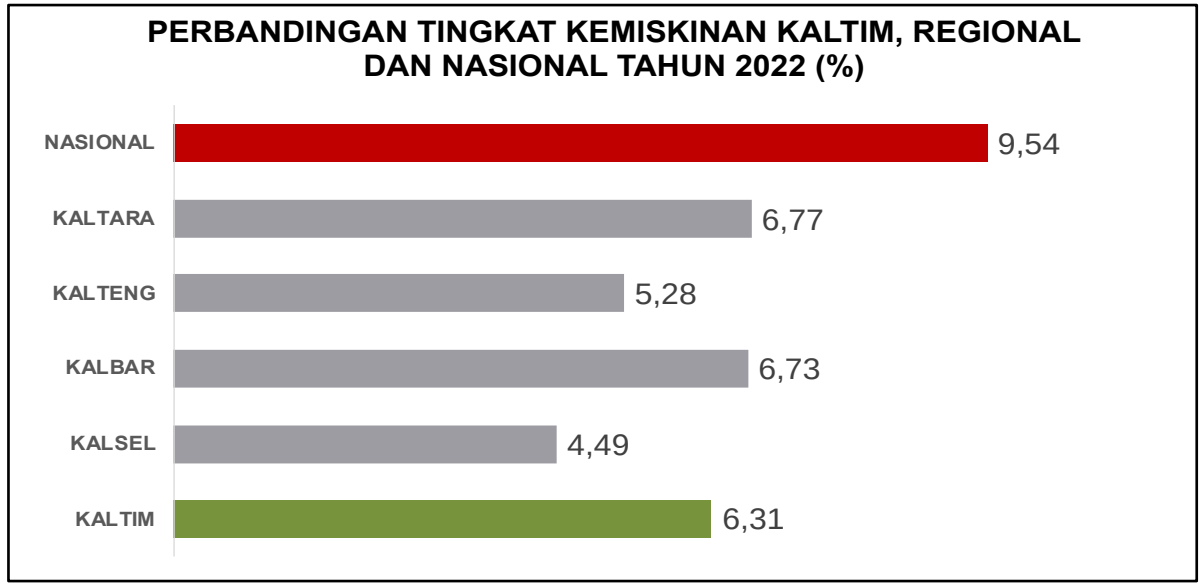

- Tingkat Kemiskinan Kaltim (Maret 2022) lebih baik dari Nasional dan terendah setelah Kalsel dan Kalteng. Tren tingkat kemiskinan Kaltim sejak tahun 2018 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat.
- Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, masih terdapat kab/kota dengan Kemiskinan tertinggi di Kaltim, yaitu Mahulu mencapai 11,55%. Sebagai daerah baru dan memiliki wilayah yang sulit diakses, menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan Mahakam Ulu.
- Permasalahan lain adalah belum maksimalnya penjangkauan dan pemerataan program pengentasan kemiskinan yang masih terpusat pada wilayah perkotaan Situasi ini dimungkinkan faktor aksesibilitas akibat kondisi geografis yang relatif sulit dan pemenuhan fasilitas penunjang lainnya, tidak terkecuali jarak dengan pusat pemerintahan dan perekonomian.

Sumber: BPS Kalimantan Timur

bappeda_kaltim Bappeda Kaltim bappeda.kaltimprov.go.id

KONDISI KESEJAHTERAAN KALTIM (2)

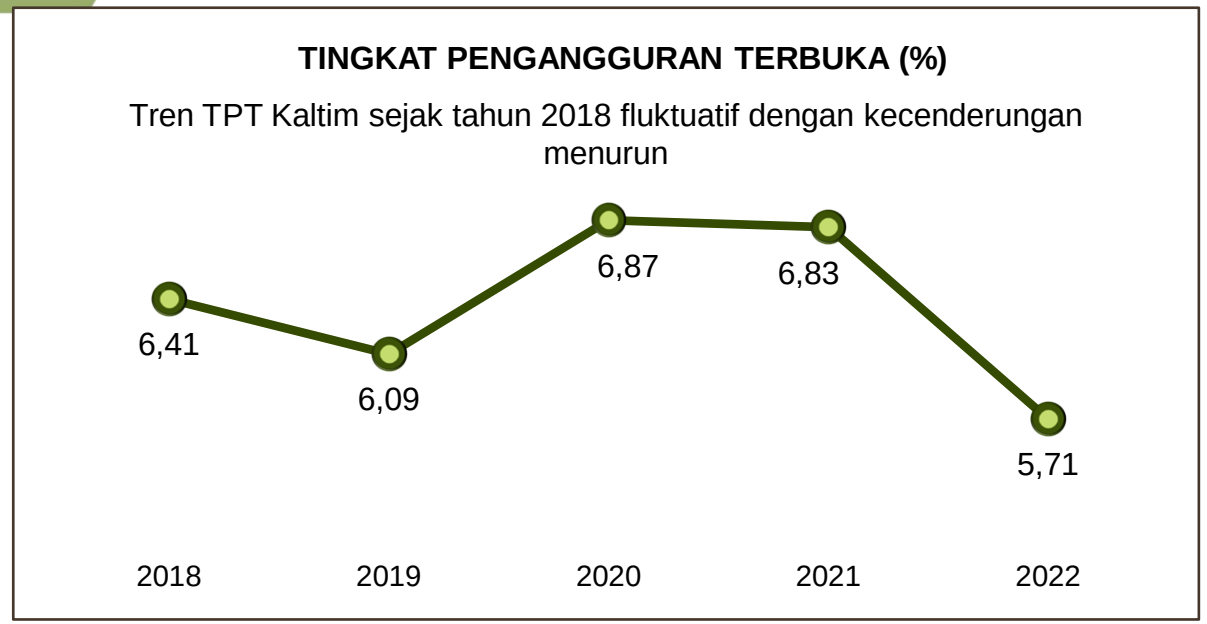

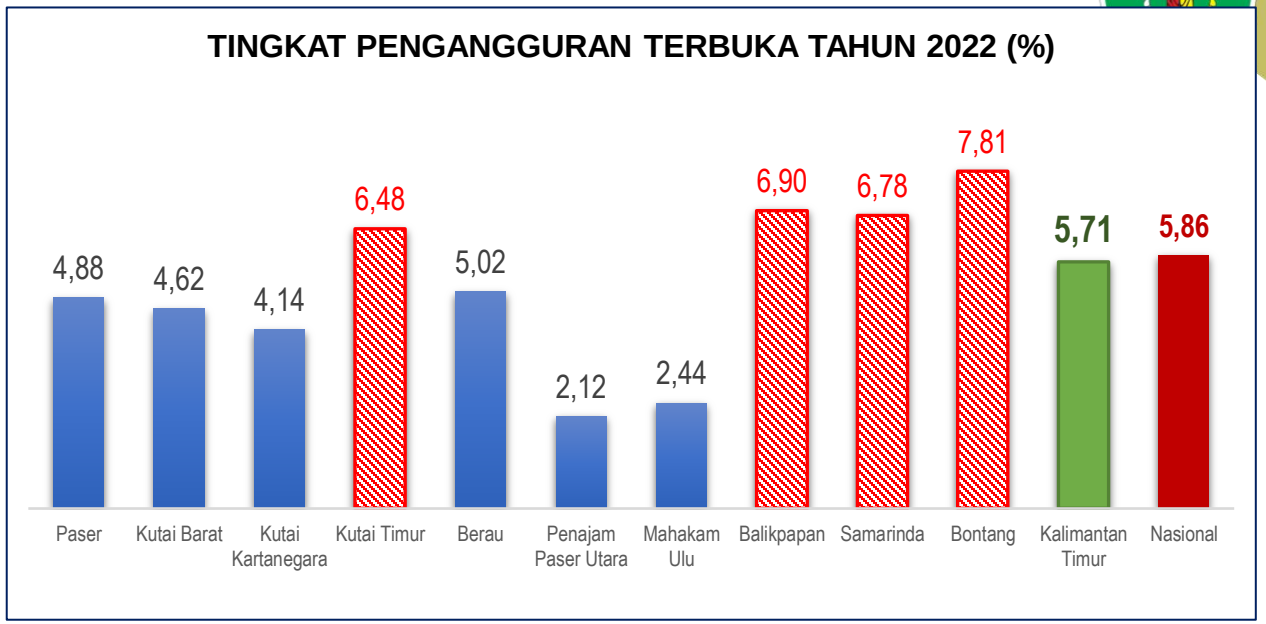

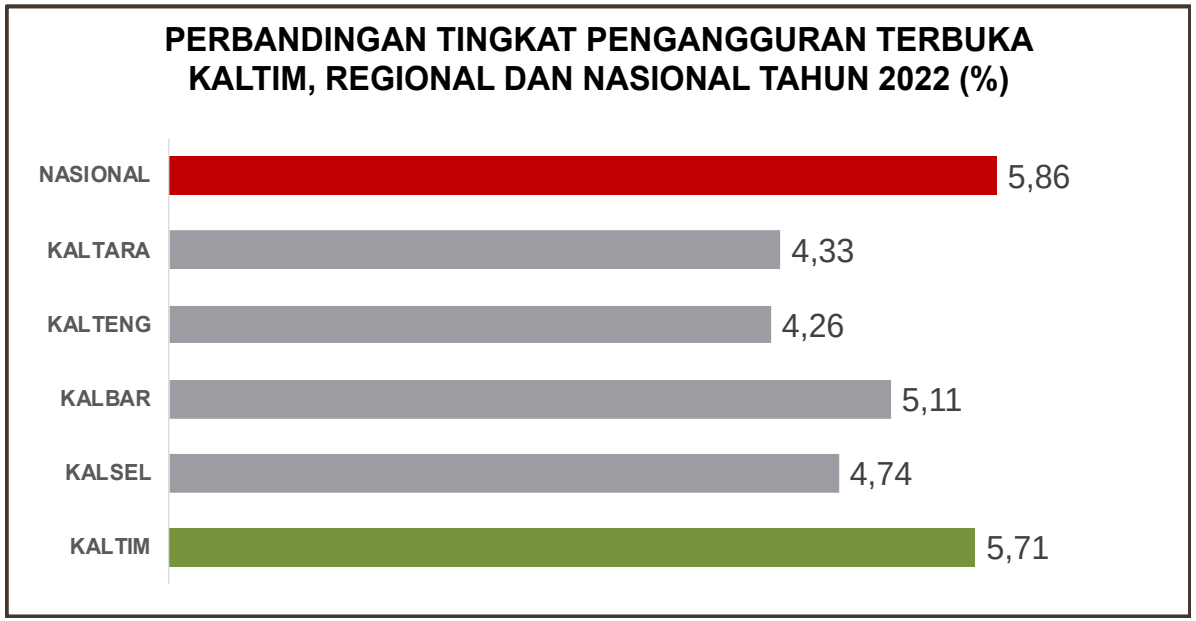

- Pada tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus 2022) mengalami penurunan lebih baik dari capaian nasional, namun capaian ini masih menjadi yang tertinggi diantara provinsi lainnya di regional Kalimantan.
- Terdapat 4 kab/kota yang TPT-nya masih diatas rata-rata Kaltim, yaitu Bontang, Balikpapan, Samarinda dan Kutim.
- Permasalahan yang masih dihadapi antara lain Rasio antara lapangan kerja dan pencari kerja masih tidak berimbang serta kompetensi atau skill yang dimiliki pencari kerja tidak sesuai dengan standar kebutuhan dunia kerja.

Sumber: BPS Kalimantan Timur

bappeda_kaltim Bappeda Kaltim bappeda.kaltimprov.go.id

KONDISI KESEJAHTERAAN KALTIM (3)

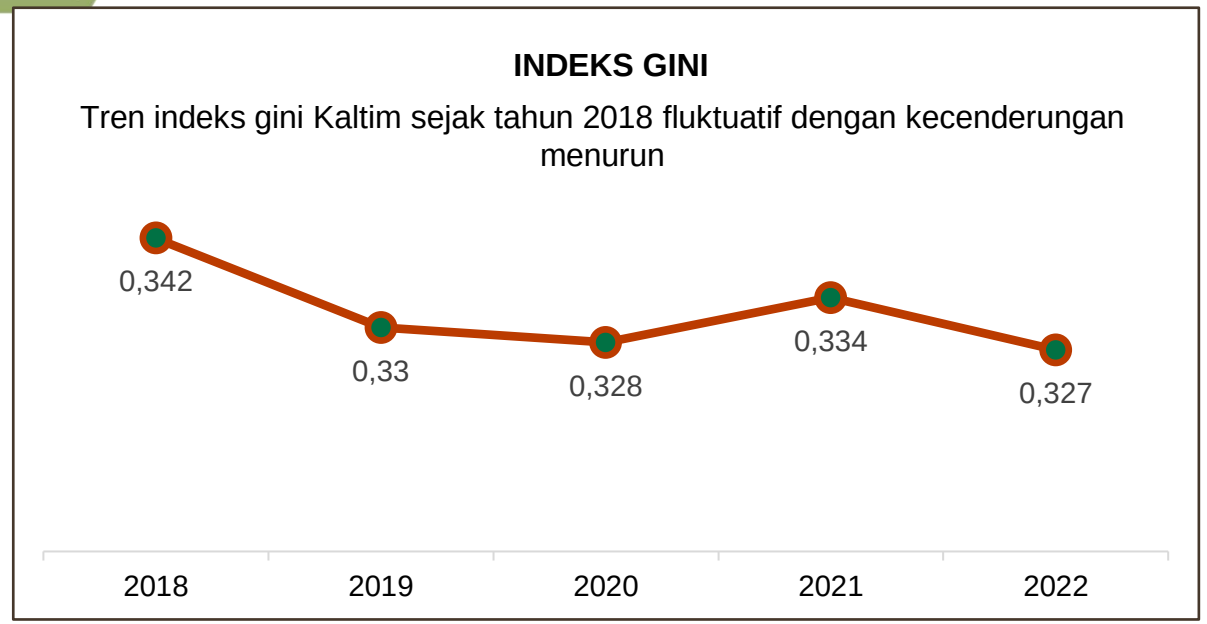

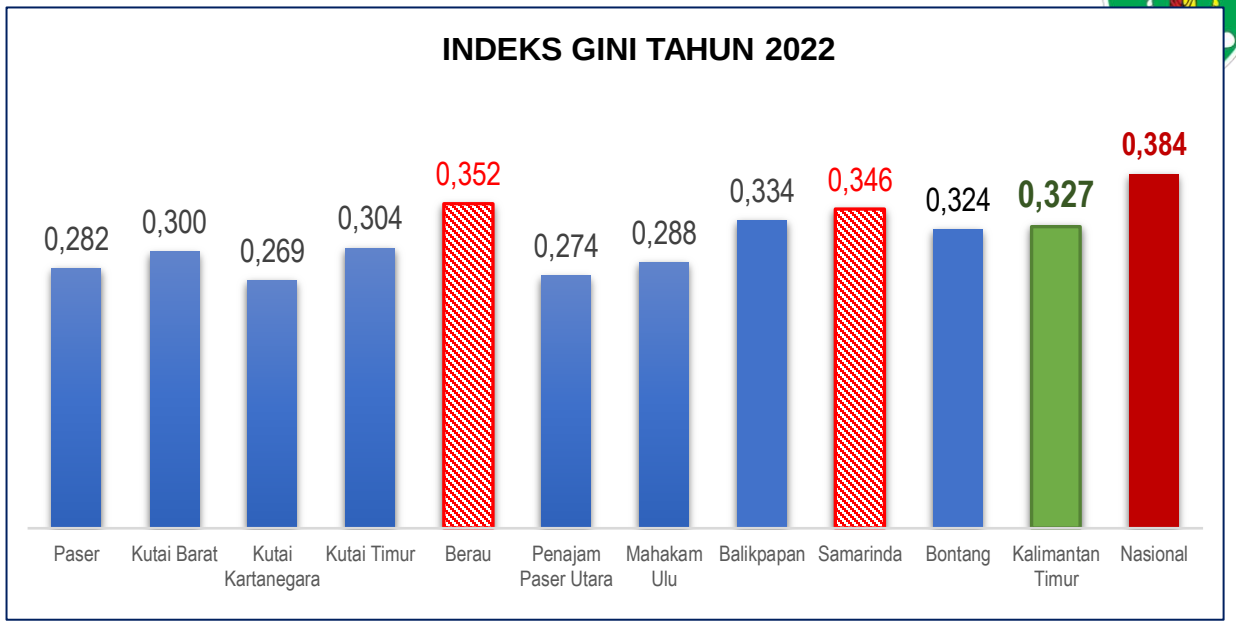

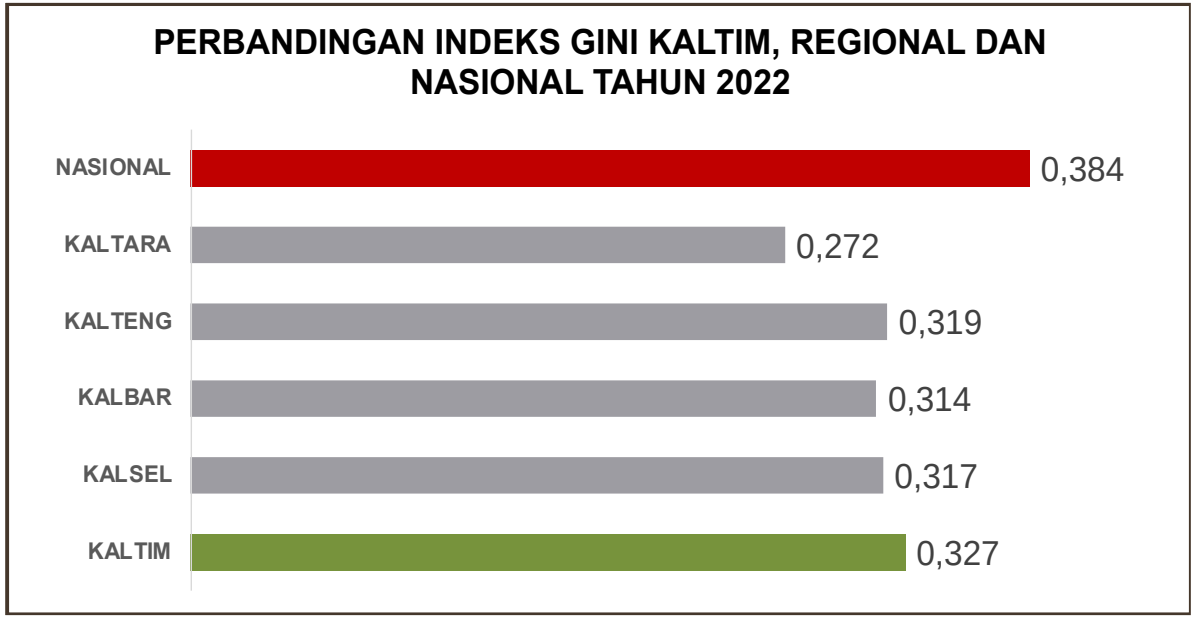

- Indeks Gini Kaltim (Maret 2022) lebih baik dari Nasional, menjadi 0,334, namun tertinggi dibandingkan dengan provinsi di regional Kalimantan lainnya.
- Terdapat 2 kab/kota yang indeks gini-nya masih diatas rata-rata Kaltim, yaitu Berau dan Samarinda.
- Cukup tingginya ketimpangan Kalimantan Timur ini dikarenakan terbatasnya konektivitas dan sulitnya aksesibilitas yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah terpelosok dan terdalam.
- Jika aksesibilitas dan konektivitas sudah baik, maka distribusi alur barang dan jasa akan lebih lancar, perekonomian masyarakat dapat bergerak secara lebih efisien dan produktif, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong kelompok berpendapatan rendah untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Sumber: BPS Kalimantan Timur

CAPAIAN PEMBANGUNAN SPESIFIK

PREVALENSI STUNTING (%)

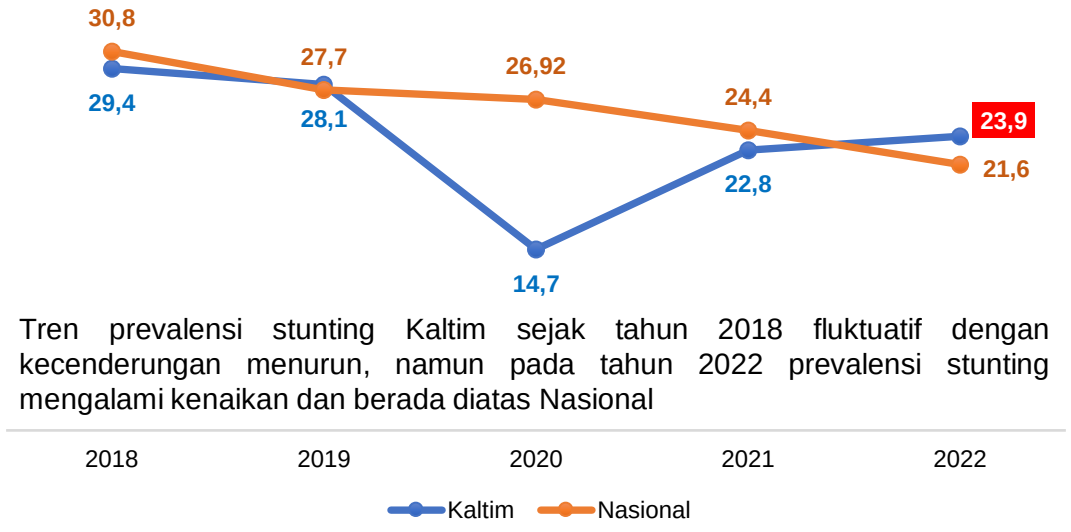

Tren prevalensi stunting Kaltim sejak tahun 2018 fluktuatif dengan kecenderungan menurun, namun pada tahun 2022 prevalensi stunting mengalami kenaikan dan berada diatas Nasional

Sumber: BPS Kaltim, 2022

JUMLAH KEMATIAN IBU DAN BAYI (JIWA)

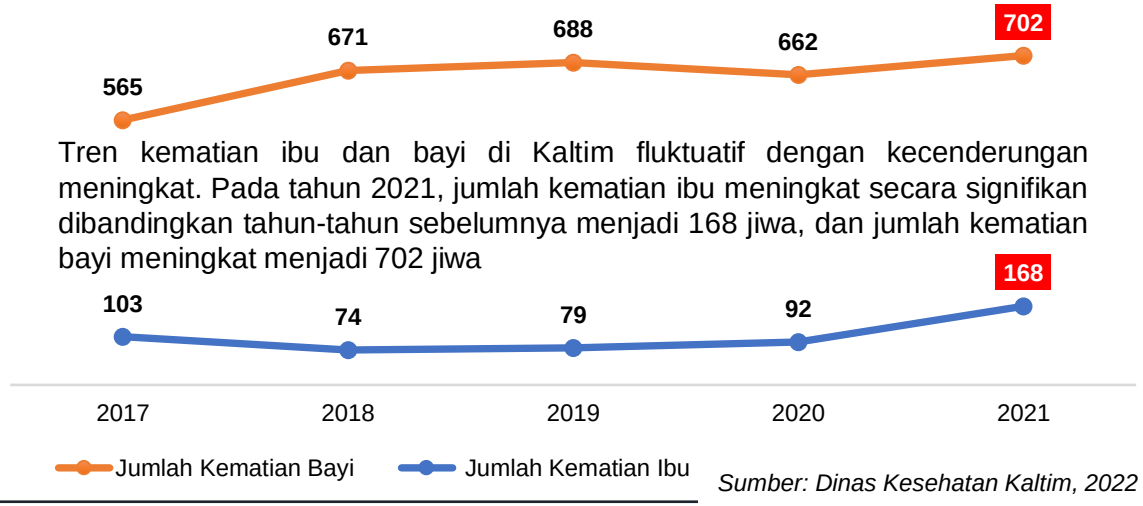

Tren kematian ibu dan bayi di Kaltim fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021, jumlah kematian ibu meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya menjadi 168 jiwa, dan jumlah kematian bayi meningkat menjadi 702 jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan Kaltim, 2022

Angka kesakitan (per 100.000 penduduk) Kaltim Tahun 2021 sebesar 73,64 dan Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 159,12.

CAPAIAN BAURAN EBT (%)

Tren bauran EBT Kaltim sejak tahun 2018 terus mengalami peningkatan namun belum mencapai target yang telah ditentukan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED)

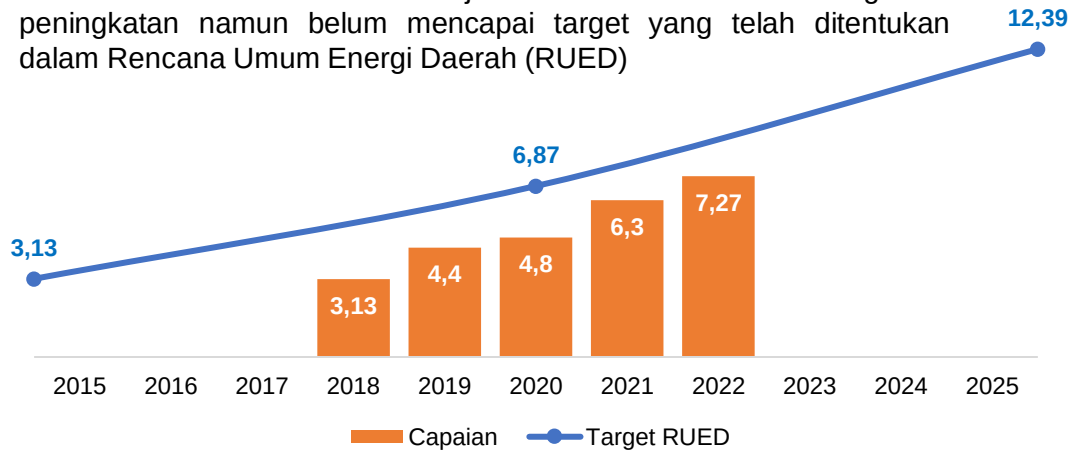

Sumber: RUED Kaltim 2019-2050

PERSENTASE KEMANTAPAN JALAN (%)

Kewenangan	Kondisi Mantap (%)			
	2019	2020	2021	2022
Pusat	99,16	76,12	82,41	84,72
Provinsi	61,45	69,77	72,50	77,52

Sumber: Dinas PUPRPERA Kaltim, 2022

Prasarana jaringan jalan provinsi sepanjang 895,09 km dengan kondisi mantap sampai tahun 2022 mencapai 693,86 km atau 77,52 persen. Capaian jalan mantap mengalami penambahan setiap tahun namun belum sepenuhnya tercapai secara maksimal 100 persen.

EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2022

No	Indikator	Target 2022	Capaian 2022
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,25	77,44
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,15	6,31
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,75	5,71
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5+1	4,48
5.	PDRB per Kapita (Juta Rp)	182,5	238,7
6.	LPE Non Migas dan Batubara (%)	2,00	6,11
7.	Nilai Tukar Petani	119,00	126,03
8.	Indeks Gini	0,327	0,327
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,05	74,46
10.	Indeks Reformasi Birokrasi	B (69,00)	B (67,70)

Tingkat kemiskinan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Reformasi Birokrasi masih belum mencapai target yang telah ditentukan, perlu upaya khusus untuk menurunkan kemiskinan dan perbaikan kinerja dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan reformasi birokrasi.

RUMUSAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

A Aspek Sumber Daya Manusia

1. Belum terpenuhinya akses pendidikan wajib belajar 12 tahun secara merata;
2. Belum optimalnya akses dan layanan fasilitas kesehatan kepada masyarakat terutama pada wilayah 3T;
3. Masih rendahnya penempatan tenaga kerja yang bersesuaian dengan kompetensi dari para pencari kerja;
4. Masih rendahnya daya saing perempuan dibidang ekonomi, sosial dan politik.

B Aspek Ekonomi Wilayah

1. Perekonomian daerah masih mengandalkan pada sektor ekstraktif pertambangan dan penggalian;
2. Relatif tingginya tingkat kemiskinan akibat pertumbuhan ekonomi yang kurang inklusif;
3. Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung ekonomi.

C Aspek Lingkungan Hidup

1. Kurang terjaganya kualitas air, air laut, udara, dan tutupan lahan
2. Tingginya potensi peningkatan emisi, utamanya akibat pemanfaatan ruang sektor berbasis lahan
3. Masih rendahnya pengimplementasian bauran energi baru dan terbarukan

D Aspek Tata Kelola Pemerintahan

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
2. Masih rendahnya kapasitas dan manajemen kinerja aparatur pemerintahan
3. Masih rendahnya implementasi SPBE dalam pengelolaan pemerintahan
4. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja di beberapa Perangkat Daerah

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

INTERNASIONAL

1. Komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dan perubahan Iklim
2. Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19
3. Transisi Energi
4. Potensi terjadinya krisis ekonomi global akibat:
   - Gangguan rantai pasok dan bencana iklim yang mengakibatkan kerawanan pangan
   - Stagflasi ekonomi dan Inflasi Tinggi akibat masih berlangsungnya perang Rusia-Ukraina

NASIONAL

1. Penuntasan RPJMN Tahun 2020-2024
2. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
4. Pelaksanaan Pemilukada Serentak 2024
5. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
6. Percepatan penanganan stunting
7. Peningkatan Reformasi Birokrasi

DAERAH

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
2. Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
5. Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI TAHUN 2024

1. Menjaga dan meningkatkan **iklim investasi di daerah**
2. Mengendalikan tingkat inflasi untuk meningkatkan **konsumsi rumah tangga**
3. Meningkatkan **kualitas belanja pemerintah** yang signifikan dapat memicu pertumbuhan sektor lainnya
4. Mendorong peran komoditas hasil olahan industri untuk peningkatan **ekspor perdagangan antar wilayah**

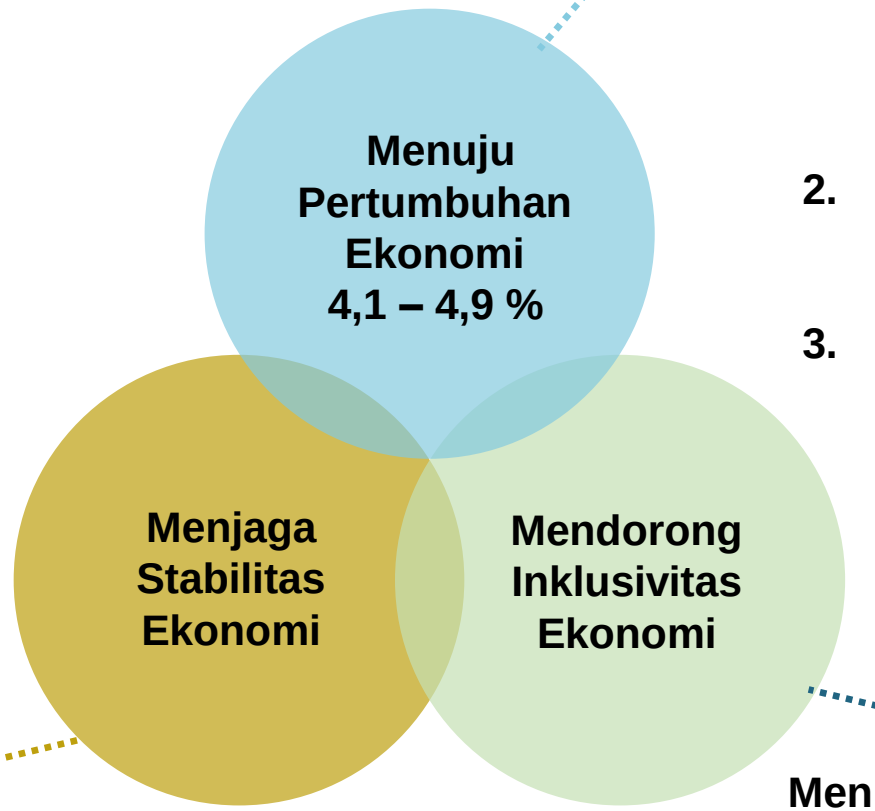

1. **Memperkuat kinerja industri pengolahan,** dengan mendorong operasionalisasi pabrik pengolahan produk kelapa sawit seperti biodiesel, minyak goreng, dan turunan lain;
2. **Meningkatkan produktivitas hasil produksi pertanian** melalui intensifikasi pangan dan ekstensifikasi perkebunan;
3. **Mendorong peningkatan sektor konstruksi, perdagangan, transportasi, serta akomodasi makan minum** untuk menangkap peluang pembangunan IKN;

Meningkatkan *trickle down effect* pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah produk unggulan, mendorong pertumbuhan sektor padat karya, serta menyiapkan SDM yang berkompeten untuk bersaing di pasar kerja

bappeda_kaltim Bappeda Kaltim bappeda.kaltimprov.go.id

PROYEKSI PENERIMAAN DAERAH TAHUN 2024

Kode Rek.	Komponen Penerimaan	Target APBD TA 2023 (Rp)	Proyeksi RKPD Tahun 2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Proporsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)	(6)
4	**Pendapatan Daerah**	**14.621.856.687.106**	**18.850.000.000.000**	**4.228.143.312.894**	**100,00**
4.1	Pendapatan Asli Daerah	**8.045.500.965.106**	9.510.000.000.000	1.464.499.034.894	50,45
4.1.01	Pajak Daerah	7.010.000.000.000	8.300.000.000.000	1.290.000.000.000	87,28
4.1.02	Retribusi Daerah	20.052.388.240	14.080.152.940	-5.972.235.300	0,15
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	232.740.891.298	244.444.456.051	11.703.564.753	2,57
4.1.04	Lain-Lain PAD yang sah	782.707.685.568	951.475.391.009	168.767.705.441	10,00
4.2	Pendapatan Transfer	6.562.497.042.000	9.311.932.777.866	2.749.435.735.866	49,40
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	6.562.497.042.000	9.311.932.777.866	2.749.435.735.866	100,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	6.562.497.042.000	9.301.932.777.866	2.739.435.735.866	99,89
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - DBH	5.021.968.600.000	7.758.263.118.029	2.736.294.518.029	83,40
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	857.929.020.000	872.370.733.844	14.441.713.844	9,38
4.2.01.01.03	DAK Fisik	190.152.584.000	192.713.322.771	2.560.738.771	2,07
4.2.01.01.04	DAK Non Fisik	492.456.838.000	478.585.603.223	-13.871.234.777	5,15
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0	10.000.000.000	10.000.000.000	0,11
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.858.680.000	28.067.222.134	14.208.542.134	0,15
4.03.01	Hibah	13.858.680.000	28.067.222.134	14.208.542.134	100,00
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**2.578.143.312.894**	**500.000.000.000**	**-2.078.143.312.894**	**100,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	2.578.143.312.894	500.000.000.000	-2.078.143.312.894	100,00
Penerimaan Daerah		**17.200.000.000.000**	**19.350.000.000.000**	**2.150.000.000.000**	

PROYEKSI PENGELUARAN DAERAH TAHUN 2024

Kode Rek.	Komponen Penerimaan	Target APBD TA 2023 (Rp)	Persentase (%)	Proyeksi RKPD Tahun 2024 (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	**BELANJA DAERAH**	**17.031.194.223.080**	**100,00**	**18.850.000.000.000**	**100,00**
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	**7.414.552.277.521**	**43,54**	**7.494.703.938.134**	**39,76**
5 . 1 . 01	Belanja Pegawai	2.796.363.758.450	37,71	2.706.860.688.397	36,12
5 . 1 . 02	Belanja Barang dan Jasa	4.207.685.257.571	56,75	4.000.643.249.737	53,38
5 . 1 . 05	Belanja Hibah	395.879.061.500	5,34	767.200.000.000	10,24
5 . 1 . 06	Belanja Bantuan Sosial	14.624.200.000	0,20	20.000.000.000	0,27
5 . 2	**BELANJA MODAL**	**4.097.300.945.741**	**24,06**	**4.673.473.395.866**	**24,79**
5 . 3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**129.340.999.818**	**0,76**	**793.322.666.000**	**4,21**
5 . 4	**BELANJA TRANSFER**	**5.390.000.000.000**	**31,65**	**5.888.500.000.000**	**31,24**
5 . 4 . 01	Belanja Bagi Hasil	4.192.500.000.000	77,78	4.588.500.000.000	77,92
5 . 4 . 02	Belanja Bantuan Keuangan	1.197.500.000.000	22,22	1.300.000.000.000	22,08
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**168.805.776.920**		**500.000.000.000**	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	168.805.776.920		500.000.000.000	
Pengeluaran Daerah		**17.200.000.000.000**		**19.350.000.000.000**	

bappeda_kaltim Bappeda Kaltim bappeda.kaltimprov.go.id

TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya
3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan
4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024 (1)

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target
			2021	2022	2023 (target)	2024
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Poin**	**76,88**	**77,44**	**77,78**	**78,32**
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,81	13,84	13,90	14,04
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,84	9,92	10,17	10,25
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,61	74,62	74,71	74,82
	Prevalensi Stunting	Persen	22,8	23,9	21,4	19
Sasaran 3: Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,83	5,71	5,63	5,46
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	66,64	66,84	66,97	67,31
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**	**Persen**	**2,55**	**4,48**	**3,5 ± 1**	**4,10-4,90**
	Tingkat Kemiskinan	**Persen**	**6,54**	**6,31**	**6,19**	**5,78**
	Indeks Gini	**Poin**	**0,334**	**0,327**	**0,32**	**0,316**
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	LPE Non Migas dan Batubara	Persen	2,81	6,11	6,45	5,90-6,70
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Poin	1,22	0,99	0,92	0,86
	Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	0,34	0,23	0,18	0,15
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Poin	6,46	6,84	7,37	7,43

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024 (2)

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target
			2021	2022	2023 (target)	2024
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Poin**	**75,06**	**74,46**	**74,90**	**75,00**
	Persentase Penurunan Emisi dari *Business As Usual* (BAU)	**Persen**	**41,96**	**70,68**	**29,33**	**31,05**
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Poin	51,92	53,02	53,42	53,52
	Indeks Kualitas Air Laut	Poin	85,4	81,45	81,85	81,95
	Indeks Kualitas Udara	Poin	88,84	87,59	88,07	88,17
	Indeks Kualitas Lahan	Poin	82,21	81,85	82,25	82,35
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari *Business As Usual* (BAU)	Persen	185,98	81,28	22,24	23,32
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Persen	6,53	7,27	8,4	10,39
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Poin**	**68,47 (B)**	**67,70 (B)**	**68,81 (B)**	**69,00 (B)**
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang professional, akuntabel, serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,57	84,41	84,6	85
	Sistem Merit	Poin	256,00	263,5	267	270
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,22	2,11	2,55	2,9
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	77,82 (BB)	78,10 (BB)	78,25 (BB)	78,50 (BB)
	Tingkat maturitas SPIP	Level	3	3	3	3 Skor 3,476

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024 (1)

Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Sasaran 3: Menurunnya tingkat pengangguran	Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan
STRATEGI Peningkatan akses dan mutu pendidikan	**STRATEGI** Peningkatan akses dan mutu kesehatan	**STRATEGI** 1. Perluasan kesempatan kerja 2. Peningkatan mutu dan daya saing tenaga konstruksi	**STRATEGI** Penerapan kesetaraan gender dalam pembangunan

ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus 2. Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus 3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan 4. Optimalisasi Boarding School 5. Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu 6. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 7. Peningkatan literasi dan numerasi 8. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar	1. Percepatan perbaikan gizi masyarakat 2. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi 3. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta 4. pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 5. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 6. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen fasyankes maupun fasilitasnya 7. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 8. Penguatan Sistem Kesehatan dan pembiayaan kesehatan 9. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan	1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja 2. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri 3. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja 4. Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan 5. Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja 6. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi	1. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan 2. Penguatan dan pengembangan kelompok masyarakat serta lembaga pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan politik 3. Peningkatan profesionalisme pekerja perempuan 4. Pemberdayaan gender antarwilayah 5. Peningkatan perlindungan perempuan serta perlindungan dan pemenuhan hak anak

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024 (2)

Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin	Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar
STRATEGI Pembangunan ekonomi inklusif	**STRATEGI** Peningkatan Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan	**STRATEGI** Optimalisasi pemenuhan infrastruktur terutama pada kawasan strategis

ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir
2. Peningkatan Strategi Promosi dan kegiatan Promosi di Kawasan industri
3. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investor di Kawasan industri
4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital
5. Peningkatan SDM UKM/IKM untuk tumbuh menjadi eksportir
6. Peningkatan dukungan kemudahan pengurusan ekspor dan kemudahan memperoleh pinjaman bagi UKM/IKM
7. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata
8. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas subsektor kehutanan
9. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Perkebunan
9. Pemberian akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan dan peningkatan kapasitas usaha kelompok masyarakat, serta peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan.
10. Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan
11. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak
12. Penguatan kelembagaan peternakan
13. Peningkatan produksi perikanan
14. Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan
15. Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura
16. Penguatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan petani tanaman pangan dan hortikultura melalui pemanfaatan teknlogi dalam usaha pertanian
17. Peningkatan iklim usaha dan investasi
18. Peningkatan Kualitas pelaksanaan investasi berbasis Online Single System (OSS)

1. Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar
2. Peningkatan keberfungsian sosial PPKS
3. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan
4. Peningkatan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial
5. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi
6. Peningkatan Daya Saing UMKM
7. Pemberdayaan perempuan kepala keluarga untuk kemandirian berusaha
8. Fasilitasi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemandirian desa
9. Peningkatan penataan permukiman kumuh dan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak

1. Peningkatan Pelayanan Jalan Provinsi
2. Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan provinsi
3. Pembangunan Jalan pada kawasan pertumbuhan ekonomi
4. Peningkatan pelayanan terminal tipe B
5. Pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi untuk meningkatkan ketersediaan air
6. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir
7. Peningkatan pemenuhan akses sanitasi
8. Peningkatan kualitas dan cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
9. Perluasan jaringan layanan moda menuju simpul utama dan kawasan perbatasn, terluar, dan terpencil
10. Penguatan distribusi barang khususnya komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan
11. Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik
12. Sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang
13. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah
14. Pengimplementasian kebijakan satu peta

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024 (3)

Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Tutupan Lahan	Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca berbasis Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang professional, akuntabel, serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAKHLAK
STRATEGI Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan	**STRATEGI** Penurunan emisi GRK dari sektor lahan	**STRATEGI** Percepatan transisi energi untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi dari fosil	**STRATEGI** Reformasi Birokrasi pemerintah daerah
ARAH KEBIJAKAN			
1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan 2. Pengendalian pencemaran air 3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut 4. Pengendalian pencemaran udara 5. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lahan dan hutan 6. Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 7. Pemeliharaan dan Perlindungan Wilayah-Wilayah Penyedia Jasa LH	1. Penurunan Deforestasi dan Degradasi Hutan 2. Pengelolaan Hutan Lestari Berkelanjutan 3. Peningkatan Peranan Konservasi Hutan 4. Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) 5. Rehabilitasi Kawasan Hutan (Regenerasi/tanpa penebangan) 6. Rehabilitasi Hutan Produksi dan Lahan (Dengan Rotasi) 7. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 8. Peningkatan pengelolaan DAS 9. Peningkatan pemanfataan biomassa perkebunan 10. Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha perkebunan	1. Pemanfaatan limbah industri pertanian dan kehutanan sebagai sumber energi secara terintegrasi dengan industrinya 2. Pengembangan dan pemanfaatan biodiesel sebagai upaya untuk mengurangi emisi GRK dan meningkatkan ekonomi masyarakat. 3. Pengembangan energi surya mencakup pemanfaatan PLTS di perdesaan dan perkotaan 4. Pengembangan infrastruktur EBT 5. Peningkatan kerjasama dalam pengelolaan EBT 6. Peningkatan edukasi kepada para pihak terutama masyarakat untuk penerapan EBT	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung dengan IT 2. Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi 3. Deregulasi Kebijakan 4. Penyederhanaan Organisasi 5. Perbaikan Tata Laksana 6. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur 7. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan 8. Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran 9. Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah 10. Peningkatan kinerja perangkat daerah dan aparatur 11. Penguatan Pengawasan 12. Optimalisasi kerja sama daerah yang sinergi dengan pembangunan IKN

bappeda_kaltim Bappeda Kaltim bappeda.kaltimprov.go.id

MAJOR PROJECT PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (1)

Prioritas Pembangunan	Major Project Tahun 2024
PP 1: Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	1. Sertifikasi 25.000 orang/tahun lulusan sekolah jenjang menengah 2. Pelatihan tenaga kerja pada BLKI sebanyak ±1.500 orang 3. Pelatihan dan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (Ahli) sebanyak 1.500 sertifikat dan Tenaga Teknisi/Analisis/Operator sebanyak 2.000 sertifikat
PP 2: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya	1. Lanjutan pembangunan gedung rawat inap baru Pandurata RSUD AWS 2. Penyelesaian pembangunan gedung pelayanan jantung terpadu RSKD 3. Pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan di daerah (SPA Minimal 60%) 4. Peningkatan kompetensi tenaga pendamping gizi pada 188 Puskesmas
PP 3: Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	1. Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi Petani (Kab. Paser) 2. Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Kab. Berau dan PPU) 3. Pengembangan 8 (delapan) Desa Korporasi Ternak (PDKT) 4. Pengembangan Kawasan Hortikultura seluas 150 Ha 5. 2 (dua) Perusahaan *(anchor tenant)* berinvestasi di KEK MBTK 6. Pengembangan Danau Kaskade Mahakam sebagai destinasi ekowisata
PP 4: Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	1. Pembangunan jembatan Nibung dan pembebasan lahan jalan akses 2. Pembangunan SPAM Regional Marangkayu (Kukar-Bontang) 3. Pembangunan jalan akses outer ringroad 4 (Batu Besaung-Bandara APT Pranoto) 4. Pembangunan jalan akses Jembatan Mahulu-Jalan Jakarta (pembebasan lahan) 5. Pembangunan Long Storage Sungai Bontang 6. Pengendalian banjir di 5 kabupaten/kota 7. Pembangunan jaringan distribusi listrik (Kab. Kutai Kartanegara)

MAJOR PROJECT PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (2)

Prioritas Pembangunan	Major Project
PP 5: Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem	1. Peningkatan pemberian bantuan langsung kepada 30.000 PMKS per tahun (terutama PMKS kategori fakir miskin) 2. 1000 unit/tahun Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 3. Penanganan 6 kawasan kumuh di 6 Kab/Kota 25 Ha per tahun 4. Penambahan alokasi untuk bantuan permodalan BUMDes melalui bantuan keuangan spesifik dana desa 5. Perhutanan sosial seluas 20.000 Ha
PP 6: Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	1. Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 12.000 Ha 2. Perlindungan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di area perkebunan seluas 456.827,13 Ha 3. Pengembangan energi baru terbarukan (Kab. Kukar, Berau, Mahulu, Paser, Kota Samarinda dan Balikpapan)
PP 7: Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	1. Peningkatan kapasitas ASN melalui Sertifikasi Kompetensi 2. 38 Perangkat Daerah memiliki predikat minimal nilai SAKIP BB (>70-80) 3. 5 (lima) Perangkat Daerah yang dipersiapkan menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 4. Peningkatan implementasi SPBE dalam tata Kelola pemerintahan
PP 8: Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	1. Studi pengembangan Wilayah dan rantai nilai Kaltim sebagai Mitra IKN 2. Penyusunan Grand Design Pengembangan SDM Kaltim yang berdaya saing

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

201

Indikasi Jumlah Program

626

Indikasi Jumlah Kegiatan

2.283

Indikasi Jumlah Sub Kegiatan

Keterangan : Nomenklatur Program yang sama di Perangkat Daerah, hanya dihitung 1 (satu)

TARGET INDIKATOR MAKRO KABUPATEN/KOTA SE-KALTIM TAHUN 2024

No	Kabupaten/Kota	IPM	LPE (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	TPT (%)	Indeks Gini
1	Paser	74,00	3,96	9,09	4,63	0,280
2	Kutai Barat	73,42	4,55	9,06	4,31	0,299
3	Kutai Kartanegara	75,51	3,5-4,0	7,50	3,90	0,268
4	Kutai Timur	75,64	5,00	8,72	5,56	0,300
5	Berau	76,53	4,29	5,32	4,62	0,344
6	Penajam Paser Utara	73,30	14,42	6,76	2,05	0,260
7	Mahakam Ulu	70,80	3,40	10,00	2,00	0,229
8	Balikpapan	81,60	5,04	2,31	6,53	0,320
9	Samarinda	82,77	6,42	4,50	4,72	0,327
10	Bontang	81,53	2,65	4,25	7,35	0,320
	KALTIM	**78,32**	**4,10-4,90**	**5,78**	**5,46**	**0,316**

ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN KABUPATEN/KOTA

NO	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	PASER	KUBAR	KUKAR	KUTIM	BERAU	PPU	MAHULU	BPN	SMD	BTG
1	Peningkatan layanan pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Peningkatan layanan kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Peningkatan kompetensi tenaga kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-
5	Peningkatan Peran BUMDes Aktif dan Berbadan Hukum	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
6	Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Pengembangan Kawasan destinasi pariwisata	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
8	Peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
9	Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓
10	Peningkatan produksi sektor peternakan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
11	Peningkatan produktivitas TPH	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-
12	Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Pengembangan hilirisasi industri	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-
14	Peningkatan pelayanan infrastruktur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
16	Pengelolaan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target 2024
I.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,44	78,32
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,48	4,10-4,90
3	Tingkat Kemiskinan (%)	6,31	5,78
4	Indeks Gini	0,327	0,316
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,46	75,00 (Baik)
6	Persentase Penurunan Emisi dari Bussiness As Usual (BAU) (%)	70,68	31,05
7	Indeks Reformasi Birokrasi	B (67,70)	B (69,00)
II.	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		
8	Prevalensi stunting (poin)	23,90	19,00
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,71	5,46
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,64 (Tahun 2021)	67,31
11	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	6,76	7,36
12	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (%)	7,27	10,39

TERIMA KASIH